

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M. (2024). KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH DAN SWASTA DALAM PENGADAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KABUPATEN LUWU TIMUR. Regional Government and Private Partnership in Procuring Green Open Space in East Luwu Regency (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Afif, F. (2022). PERAN PEMERINTAH KABUPATEN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN PUNGUT MUDIK-SUNGAI KUNING DI KABUPATEN KERINCI (Doctoral dissertation, Ilmu Pemerintahan).
- Ali, M. (2002). Perilaku organisasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- ASHAR, K. (2024). STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI KERUSAKAN INFRASTRUKTUR JALAN DI KECAMATAN METRO UTARA KOTA METRO (Studi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Barton, A. H. (2000). Public policy and public administration. New York: McGraw-Hill.
- Biddle, B. J., & Thomas, E. J. (Eds.). (1966). Role theory: Concepts and research. New York: John Wiley & Sons.
- Cohen, B. J. (1992). Sosiologi: Suatu pengantar. Jakarta: Rineka Cipta.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 673.
- Goffman, E. (1959). The presentation of self in everyday life. New York: Doubleday.
- Grigg, N. S. (1988). Infrastructure engineering and management. New York: John Wiley & Sons.

- Hasrisal, H., Abdurrahman, M. A., & Ramli, M. I. (2022). Study of the pandemic impact of COVID-19 on road project performance in South Sulawesi Province. *Lowland Technology International*, 24(1), 13–19. https://doi.org/10.0001/ialt_lti.v24i1.1454
- HAW, Wijaya. (2007) .Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Halaman 133.
- Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik, (Jakarta: PT Bumi Aksara)
- Instita, R, E. 2015. PENGARUH PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR JALAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN MANUSIA DI JAWA BARAT. INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG. THESIS. Halaman 11-13.
- Kaho, J. R. (2015). Prospek otonomi daerah di Negara Republik Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmira, Alias, and Sudarmi, “Strategi Pemerintah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Gowa,” *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik* 1, no. 3 (2020): 818–33
- Kuncoro, M. (2010). Masalah, kebijakan, dan politik ekonomi pembangunan. Jakarta: Erlangga.
- La’abu, I. 2017. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemasaran Pariwisata Bahari Di Kecamatan Banda Naira Kabupaten Maluku Tengah. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Linton, R. (1936). *The study of man: An introduction*. New York: Appleton-Century.
- M. Rendi Aridhayandi, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dibidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol 48 No. 4, (2018)
- Mahfud MD. (2019). *Membangun politik hukum, menegakkan konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: Andi.

- Moonti, R. M. (2017). Hakikat Otonomi Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 20(2), 26-37.
- Muharani, A. (2018). Implementasi Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Keterbiban Umum (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- NUR AFNI OCTAVIA, N. A. (2020). Peran Pemerintah Daerah Dalam Revitalisasi Infrastruktur Jalan Poros Sabbang-Rongkong Kabupaten Luwu Utara (Perspektif Siyasa Syariah) (Doctoral dissertation, Institut agama islam Negeri (IAIN Palopo)).
- Nurahmat, D. (2019). Ta: Kajian Sistem Kontrak Konvensional Dan Kontrak Long Segment Pada Pekerjaan Preservasi Jalan Nasional (Doctoral dissertation, Institut Teknologi Nasional).
- Rivai, V. (2006). Manajemen sumber daya manusia untuk perusahaan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ruben, A., dkk. (2024). Evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam pemeliharaan jalan provinsi. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15 (1), 33–47.
- Sadikin, A., dkk. (2021). Analisis faktor penyebab kerusakan jalan dan implikasinya terhadap kinerja pelayanan jalan. *Jurnal Transportasi*, 21 (2), 85–97.
- Simbolon, F. (2021). Peran pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan. *Jurnal Administrasi Publik*, 12 (1), 45–56.
- Soares, J., dkk. (2015). Infrastructure development and regional economic growth. *Journal of Regional Development*, 7 (3), 210–223.
- Soekanto, S. (2009). Sosiologi suatu pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sriwaty, E. (2024). Analisis peran infrastruktur terhadap pembangunan wilayah. *Jurnal Pembangunan Wilayah*, 9 (1), 1–12.
- Subarsono, A. G. (2017). Analisis kebijakan publik: Konsep, teori, dan aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Suradinata, E. (2002). Manajemen pemerintahan dan otonomi daerah. Bandung: Ramadhan.
- Tjokroamidjojo, B. (1988). Perencanaan pembangunan. Jakarta: Gunung Agung.
- Zaenal, A. H., Rahim, A., Bado, B., Ma'ruf, M. I., & Hastuti, D. R. D. (2025). Efisiensi dan efektifitas anggaran pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi Sulawesi Selatan. *Bulletin of Economic Studies (BEST)*, 5(3), 208–222. <https://doi.org/10.24252/best.v5i3.62814>

Peraturan Perundang – Undangan ;

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 09/SE/Db/2021 tentang Pedoman Preservasi Jalan.
- Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 534/KPTS/M/2001.

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Laporan dan Data Resmi ;

Badan Pusat Statistik. (2024). Panjang jalan menurut provinsi dan tingkat kewenangan pemerintahan tahun 2023. Jakarta: BPS.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2024). Data infrastruktur jalan nasional dan daerah. Jakarta: KemenPUPR.

Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan. (2024). Laporan kondisi jalan provinsi Sulawesi Selatan. Makassar.

Media Massa ;

Antara News Makassar. (2023, 11 Januari). PUTR Sulsel lakukan penanganan darurat Jalan Hertasning. Antara News Makassar. Diakses dari <https://makassar.antaranews.com/berita/455301/putr-sulsel-lakukan-penanganan-darurat-jalan-hertasning-makassar>

detikSulsel. (2023, 30 Januari). Jalan Hertasning-Aroepala Makassar rusak tergenang air, bahayakan pengendara. Detik.com. Diakses dari <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6541860/jalan-hertasning-aroepala-makassar-rusak-tergenang-air-bahayakan-pengendara>

detikSulsel. (2023, 4 Februari). 6 fakta Jalan Hertasning-Aroepala Makassar rusak parah — jadi langganan macet. Detik.com. Diakses dari <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6550903/6-fakta-jalan-hertasning-aroepala-makassar-rusak-parah-jadi-langganan-macet>

SuaraSulsel.id. (2025, 6 Oktober). Akhirnya! Jalan Hertasning-Aroepala Makassar siap dibeton dan diaspal. SuaraSulsel.id. Diakses dari <https://sulsel.suara.com/read/2025/10/06/124631/akhirnya-jalan-hertasning-aroepala-makassar-siap-dibeton-dan-diaspal>